



Serangan Pornografi

Oleh **Rendra Widyatama**



BEBERAPA waktu lalu dunia pendidikan dihebohkan dengan ditemukannya buku-buku bermuatan porno dan kekerasan. Buku-buku tersebut ditemukan di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kota lain. Ada banyak

judul buku, antara lain *Ada Duka di Wibeng, Tidak Hilang Sebuah Nama, Tambelo: Kembalinya Si Burung Camar, Tambelo: Meniti Hari di Ottawa, Syahid Samurai, Festival Syahadah, dan Sabuk Kiai*.

Ngerinya, buku-buku tersebut "direkomendasikan oleh Diknas" untuk perpustakaan SD, karena telah lolos dari penilaian Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puskurbuk Kemdikbud). Meski sudah ditarik, semestinya persoalan tersebut tidak boleh berhenti sampai di sini.

Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Pertama, perlu dipertanyakan moral dan motivasi penulis yang membuat naskah. Dalih menghasilkan bacaan khusus dewasa tidak dapat diterima akal sehat, karena buku merupakan media komunikasi yang bersifat terbuka. Meski dituliskan peringatan "khusus dewasa" di cover buku, tidak dapat menghindari pembaca yang tidak berhak.

Patut Disesalkan

Alasan salah distribusi juga patut disesalkan. Pornografi dan kekerasan tidak layak dikonsumsi semua umur, sehingga tidak pantas didistribusikan untuk siapa pun. Mengemukakan argumen bahwa kekerasan dan pornografi sudah banyak dijumpai, tapi tidak ditindak aparat, juga logika yang sesat.

Lolosnya buku bermuatan pornografi dan kekerasan melalui Puskurbuk Kemdikbud, juga patut diselidiki. Apakah dalam penetapan tersebut petugas tidak membaca secara teliti, atau ada kongkalingkong antara pejabat yang berwenang dengan penerbit? Lolosnya buku-buku tidak pantas itu mengindikasikan sistem pengawasan tidak dijalankan.

Proyek pengadaan buku, termasuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), harus diaudit menyeluruh, khususnya dalam mekanisme dan sistem pengadaan. Penemuan buku bermuatan porno dan kekerasan terjadi setidaknya setelah enam bulan sejak distribusi, juga pantas dievaluasi. Aspek ini menandakan pihak penerima buku tidak kritis, karena tidak melakukan cek silang.

Terakhir, kasus buku bermuatan pornografi dan kekerasan tidak boleh berhenti pada penarikan semata. Kemdikbud harus memberikan sanksi tegas pada aparat yang lalai menjalankan kewajibannya. Harus diwaspadai, lolosnya buku bermuatan pornografi dan kekerasan bisa jadi merupakan serangan langsung ke jantung pendidikan, guna merusak moral bangsa. (37)